PENGARUH RETRIBUSI OBYEK WISATA LOMBONGO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE BOLANGO

ARTIKEL JURNAL

NINGSIH KUKU
NIM. D01417043

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 1

PENGARUH RETRIBUSI OBYEK WISATA LOMBONGO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE BOLANGO

Ningsih Kuku[1], Ramlah Alkatiri[2], Sri Hantuti Paramata[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: ningsih-kuku@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the acceptance of acceptance of tourism object Lombongo on local revenue. This research uses a quantitative approach based on its study of secondary data, namely the time series data (time series) 2015-2019 Bone Bolango Regency. The results show that the levies for Lombongo tourism objects every year in the last 5 years (2015-2019) have continued to decline, seen from the achievement of realization. However, they are still able to contribute to the PAD of Bone Bolango Regency. The results of the calculation of simple linear recreation and the calculation of the coefficient of determination show that the tourism object charges of Lombongo have a significant effect on PAD revenue as indicated by the RSquarenya value = 0.679 or 67.9 percent. While the remaining 31.1 percent is based on other factors not examined. The test results are significant in the Model Summary table Sig = 0.086> criteria (0.05), thus the regression model equation based on the research data is significant, meaning that the linear regression model meets the linearity criteria.

Keywords: *Retribution, Tourism Object, PAD*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi obyek wisata Lombongo terhadapa pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berdasarkan kajiannya pada data sekunder yaitu data time series (runtun waktu) tahun 2015-2019 Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian bahwa retribusi obyek wisata Lombongo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa retribusi obyek wisata Lombongo memiliki pengaruh nyata terhadap penerimaan PAD sebagaimana ditunjukkan oleh nilai $R_{Squarenya}$=0.679 atau 67,9 persen. Sementara sisanya sebesar 31,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji signifikan pada tabel *Model Summary Sig* = 0,086 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Kata Kunci: Retribusi, Obyek Wisata, PAD

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan.

Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayananan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian terhadap manajemen pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Utang Rosidin, 2015;135).

Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo pada tahun 2003 yang senantiasa berupaya mencari sumber-sumber penerimaan dalam menopang pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha keras untuk memaksimalkan setiap sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang seyogyanya dapat menopang anggaran pembangunan yang setiap tahunnya tak tercukupi.

Peneliti ini akan difokuskan pada salah satu sumber penerimaan daerah di atas, yaitu Retribusi Obyek Wisata Lombongo. Retribusi daerah adalah merupakan komponen kedua setelah pajak dari empat komponen Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah terbagi dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitas yaitu retribusi obyek wisata yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 Objek Retribusi Obyek Wisata adalah pelayanan penyediaan tempat wisata yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung (turis) domestik (lokal) maupun manca negara, yang disediakan, atau dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Diharapkan agar supaya objek retribusi ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah.

Dari sekian banyak obyek wisata alam yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango yang menarik untuk diteliti menurut peneliti adalah obyek wisata Lombongo. Hal ini didasarkan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Obyek wisata Lombongo selain sebagai obyek wisata tertua, letaknyapun dekat dari pusat pemerintahan
2. Obyek wisata ini sangat strategis karena merupakan wisata alam dengan ciri air panasnya dan air dingin, dan
3. Obyek wisata ini telah ditunjang oleh fasilitas yang memadai sebagai sebuah kawasan wisata.

Namun dari ketiga alasan di atas, setelah peneliti melakukan observasi dan pengamatan lapangan, ternyata permasalahan yang ditemui fasilitasnya kurang mendapatkan sentuhan pemeliharaan dengan baik. Kalaupun ada pemeliharaan sifatnya kurang optimal tidak melakukan perubahan-ubahan secara signifikan. Selain itu promosi masih kurang gencar dilakukan oleh pengelolah serta instansi yang bekepentingan (Dinas Pariwisata), serta permasalahan-permasalahan manajemen kelolah masih kurang profesional.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi antara lain dengan menetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2009 Tentang Retribusi. Pertanyaannya apa retribusi obyek

wisata mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD?

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh retribusi Obyek Wisata Lombongo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango. Tujuannya adalah a) Mengetahui pengaruh retribusi obyek wisata Lombongo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Bone Bolango b) Mengkaji dan menganalisis bagaimana perkembangan retribusi obyek wisata Lombongo dan PAD Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi retribusi obyek wisata Lombongo selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai seperti berikut ini:

a. "X" adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X adalah realisasi penerimaan obyek wisata Lombongo dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.
b. "Y" adalah variabel tidak bebas (*dependent variabel*), adalah variabel ini adalah nilai yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah nilai Y adalah realisasi total penerimaan PAD, dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan penelitian ini ditempuh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

a. Observasi, Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas BKAD Kabupaten Bone Bolango yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain mengenai jumlah retribusi dan besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
b. Dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data pada instansi atau lembaga yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone Bolango untuk memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang Retribusi obyek wista Lombongo, Retribusi secara total, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari dokumen-dokumen seperti: Referensi Buku, Jurnal, Data DPPKAD, Skripsi yang telah diteliti dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan

menggunakan analisis regresi dan korelasi.

a. Analisis Regresi Sederhana

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara Retribusi Obyek Wisata Lombongo (*Independent Variable atau X*) dan besarnya PAD (*Dependent Variable atau Y*)

Persamaan regresi untuk analisis regresi sederhana adalah:

$$\hat{Y} = a + bx$$

Keterangan:

Ŷ= subjek dalam variabel dependen yang diprediksi (PAD)

a = harga Y bila X = 0 (konstan)

b= angka arah / koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel kriterium yang didasarkan pada variabel prediktor

x= subjek pada variabel prediktor yang mempunyai nilai tertentu (Retribusi Obyek Wisata Lombongo)

Secara teknis harga b merupakan tangen dari (perbandingan) antara panjang garis variabel kriterium, setelah persamaan regresi ditemukan Sugiyono (Imam Gunawan, 2016:205). Rumus untuk menghitung harga b dan a, yaitu:

b = $\frac{S_Y}{S_X}$

a = Y - b^{x}X

Keterangan:

r = koefisien korelasi X – Y

S_Y = deviasi standar y

S_X = deviasi standar x

Jadi harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga b juga besar. Sebaliknya bila koefisien korelasi rendah, maka harga b juga rendah (kecil). Selain itu bila koefisien korelasi negatif, maka harga b juga negatif. Sebaliknya bila koefisien korelasi positif, maka harga b juga positif. Selain itu harga a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Untuk mempermudah analisis data, maka akan digunakan bantuan SPSS dalam pengolahan selanjutnya.

b. Analisis Korelasi

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara Retribusi Obyek Wisata Lombongo (*Independent Variable*) dan besarnya Pendapatan Asli Daerah (*Dependent Variable*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Retribusi Obyek Wisata Lombongo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu dari penelitian ini, bahwa retribusi Obyek Wisata Lomboto adalah salah satu jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan oleh daerah daerah.

Untuk melihat bagimana perkembangan penerimaan retribusi Obyek Wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Retribusi Obyek Wisata Lombongo Kabupaten Bone BolangoTahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	9.483.000	34,44
2016	68.731.000	624,78
2017	66.950.000	-2,59
2018	329.115.000	391,58
2019	464.573.000	41,16
Rata-Rata	187.770.400	-59,58

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa penerimaan retribusi Obyek Wisata Lombongo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) sangat fluktuatif atau naik turun. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan besaran kenaikan hingga mencapai 624,78 persen dari tahun sebelumnya (2015), atau naik sebesar Rp. 68.731.000 – Rp. 9.483.000 = Rp. 59.248.000,- Namun sangat disayangkan pada tahun berikutnya (2017) terjadi penurunan penerimaan retribusi obyek wisata Lombongo yaitu turun Rp. 1.781.000,- atau -2,59 persen. Pada tahun 2018 meningkat lagi secara signifikan hingga mencapa 391,59 persen atau Rp. 262.156.000,-. Tetapi pada tahun 2019 turun lagi cukup drastis dimana hanya meningkat 41,16 persen atau Rp. 135.458.000,-

Kondisi tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, yaitu adanya fasilitas maupun sarana dan prasarana yang tidak menunjang lagi. Permasalahan lain khususnya pada 3 tahun terakhir pegawai pengumpulan yang kurang professional, serta kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam melakukan perbaikan dan bahkan renovasi fasilitas yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rekreasi. Kesemuannya itu pada akhirnya berdampak pada penerimaan retribusi obyek wisata Lombongo yang terus mengalami penurunan hingga puncaknya pada tahun 2019 realisasinya mencapai titik terendah.

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	697.980.906.108	22,23
2016	875.639.023.437	25,45
2017	871.081.755.716	-0,52
2018	975.640.606.512	12,00
2019	976.557.861.763	0,09
Rata-Rata	879.380.034.707	36,89

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa keselurahan penerimaan PAD realisasinya tidak optimal. Hal ini terlihat bahwa tidak ada satupun capaian realisasi hanyal pada angka perkembangannya mencapai angka 100 25,45 persen pada tahun 2016. persen, bahkan paling maksimal Selebihnya hanya mencapai realisasi kurang dari 25 persen bahkan pada

tahun 2017 realisasinya hanya mencapai -0,52 persen.

Hal tersebut tentunya sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah, karena seharusnya potensi yang dimiliki daerah khususnya melalui penerimaan retribusi obyek wisata akan sangat menunjang pembangunan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti, pajak daerah, penerimaan lain yang sah, serta penerimaan sisa hasil perusahaan daerah. Jika hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah daerah, maka kecenderung penerimaan dari retribusi daerah akan semakin menurun, dan pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan-penerimaan PAD lainnya serta realisasi pembangunan pada umumnya.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	879379.4000	113686.17485	5
X	187.2000	198.35498	5

Analisis bagian Descriptive Statistics

a. Rata-rata nilai PAD (Y) dari 5 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 879.379.40,- dengan standar deviasi Rp. 113.686.17.-
b. Rata-rata Retribusi Obyek Wisata (X) adalah Rp. 187,20 dengan standar deviasi Rp. 198,35.-

Correlations

		Y	X
Pearson Correlation	Y	1.000	.824
	X	.824	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.043
	X	.043	.
N	Y	5	5
	X	5	5

Sumber: Hasil SPSS

Analisis bagian Correlations

a. Besar hubungan antara Nilai PAD dengan Retribusi Obyek Wisata Lombongo dapat diketahui dengan melihat koefesien korelasi adalah = 0,824, artinya nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara hasil Nilai PAD dengan Retribusi Obyek Wisata Lombongo, nilai koef

2. Analisis Pengaruh Retribusi Obyek Wisata Lombongo Terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi Obyek Wisata Lombongo terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Ver.16.

Dalam analisis ini menggunakan pula pendekatan rumus regresi liner sederhan, dan korelasi, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kedua variable (X = retribusi obyek Wisata dan Y=PAD)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kuatnya hubungan antara variabel independent (x) Retribusi Obyek Wisata terhadap variabel dependent (Y) PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dapat dilihat pada hasil analisis Correlations sebagai berikut:

b. esien korelasi semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut (arah hubungan ke positif).
c. Taraf kepercayan yang digunakan yaitu 0.05. diperoleh hasil tingkat signifikan koefesien korelasi sebesar 0.043. karena nilainya lebih kecil dari 0.05 maka hubungan PAD dengan Retribusi Obyek Wisata Lombongo berbeda secara nyata

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar nilai koefisien determinansinya atau besarnya pengaruh Retribusi Obyek Wisata Lombongo terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango, maka berikut ini ditampil hasil analisis *Model Summary* seperti dibawah ini:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.824[a]	.679	.572	74378.25224	.679	6.345	.086

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Analisis bagian *Model Summary*

Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai ***R*** sebesar 0.824 atau koefesien korelasi nilai R tersebut dapat dikuadratkan yaitu 0.824 x 0.824 = 0.679. ***R*** *square* (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel terikat (nilai Retribusi Daerah) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Retribusi Obyek Wisata Lombongo) yaitu sebesar 67,9 % atau memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan PAD.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hubungannya sangat berarti atau memiliki hubungan kuat antara PAD Kabupaten Bone Bolango dengan Retribusi Obyek Wisata Lombongo.

Tahapan berikutnya adalah mengetahui nilai peramalan atau prediksi pengaruh Retribusi Obyek Wisata Lombongo terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango digambarkan melalui hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	790970.192	48355.699		16.357	.000
	X	472.271	187.488	.824	2.519	.086

a. Dependent Variable: Y

Hasil persamaan regresinya adalah:

Y = 790.970,192 + 472,271X

Dimana:

Y = PAD

X = Retribusi Obyek Wisata Lombongo

Dari persamaan di atas, nilai **Rp. 790.970,192 milyar** merupakan konstanta, artinya bila tidak ada nilai Retribusi Obyek Wisata Lombongo, maka PAD tetap nilai **Rp. 790.970,192 milyar**

Koefesien regresi **Rp. 472,271** menandakan setiap ada peningkatan satu satuan (x = Retribusi Obyek Wisata Lombongo) maka Y (PAD) ada peningkatan sebesar **Rp. 472,271** atau tergantung nilai x, begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini uji t sangat dibutuhkan untuk menguji signifikan konstanta dan varibel bebas (Retribusi Obyek Wisata Lombongo). Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan di uji apakah variabel bebas dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi nilai PAD yang akan datang.

Sebelumnya kita buat hipotesis:

H0 = koefesien regresi tidak signifikan

H1 = koefesien regresi signifikan

Pengujian statistik:

jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, nilai probabilitas > 0.05

jika t hitung > t tabel maka H1 di tolak, nilai probabilitas < 0.05

dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} = 16.357 dan t_{tabel} = 2.015. Jadi t_{hitung} = 4.972 > t_{tabel} = 2.015, dan nilai

signifikan atau probabilitas 0.000. Maka berdasarkan pengujian statistik H0 di tolak dan H1 diterima. Jadi koefesien regresi signifikan atau retribusi Obyek Wilsata Lombongo berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas model regresi yang diperoleh sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun-tahun berikut.

PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7

jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing *(open list)* sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango, untuk memungut 13 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah *(sifatnya close list)*.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini hanya memungut 9 jenis pajak daerah. Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 32 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari masyarakat, sehingga masih terdapat 3 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang sangat pesat, sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memungut pula jenis retribusi tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas, dimana penjelasan tentang retribusi obyek wisata Lombongo tidak bisa lepas dari penjelasan PAD yang merupakan komponen retribusi daerah yang telah diuraikan di atas. Tentunya yang yang telah diuraikan di atas, bahwa berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dapat dikatakan telah maksimal. Hal ini terkonfirmasi pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu komponen retribusi daerah yaitu retribusi obyek wisata Lombogo telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan nyata terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango.

Hasil analisis melalui penelitian ini tentang pengaruh retribusi obyek wisata Lombongo terhadap PAD ternyata cukup signifikan. Dalam uji hipotesis terbukti bahwa retribusi obyek wisata Lombongo signifikan terhadap PAD karena pengujian statistik H0 di tolah dan H1 diterima. Sehingga koefesien regresi signifikan atau retribusi obyek wisata Lombongo berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango setidaknya pada lima tahun terakhir (2015-2019). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian terbukti benar dan dapat diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

1. Retribusi obyek wisata Lombongo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango.
2. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa retribusi obyek wisata Lombongo memiliki pengaruh nyata terhadap penerimaan PAD sebagaimana ditunjukkan oleh nilai $R_{Squarenya}$=0.679 atau 67,9 persen. Sementara sisanya sebesar 31,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti
3. Hasil uji signifikan pada tabel *Model Summary Sig* = 0,086 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah

signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Retribusi obyek wisata Lombongo adalah merupakan sumber penerimaan PAD yang memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan bagi daerah. Karena itu diperlukan aspek-aspek penajaman regulasi yang mendorong animo wisatawan baik domestik maupun manca Negara.
2. Penyiapan sarana dan prasaran perlu terus ditingkatkan.
3. Untuk menjadikan obyek wisata ini lebih maju dan professional, perlu diserahkan pada swasta dalam bentuk kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), *Manajemen Jilid I*, terjemahan. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo, 1996

Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andrew E. Sikula. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga. Bandung.

Devas, Nick.2012. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S.P 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Hasibuan, Malayu S,P. *Organisasi dan Motivasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

I Gede Pitana dan I ketut S.D., 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset

Kaho, Joseph Riwu. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo MBA 2007. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: cv andi ofiset. Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

W.J.S, Poerwadarminta,2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018